

**Determinan Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Putri Laila Sari¹, Periansya², Desi Indriasari³

Politeknik Negeri Sriwijaya

putrilailasari18@gmail.com¹, periansya@polsri.ac.id², uno1.adies2@gmail.com³

ABSTRACT

The research aims to examine the effects of local government size, intergovernmental revenue, job specialization, and capital expenditure on the level of mandatory financial statement disclosure of local governments. Disclosure is based on Government Regulation related to Government Accounting Standards Number 71 of 2010. Secondary data is sourced from Audit Reports (LHP) on Local Government Financial Statements (LKPD). The sample comprises 17 districts/cities in South Sumatra Province with 51 LKPD audit reports from 2020-2022. Data is analyzed using multiple linear regression techniques with Eviews 12. The study finds that local government size significantly and positively affects the level of mandatory financial statement disclosure; intergovernmental revenue significantly and negatively affects the level of mandatory financial statement disclosure; while job specialization and capital expenditure do not have a significant effect on the level of mandatory financial statement disclosure; and all four factors together significantly affect the level of mandatory financial statement disclosure

Keywords: *Size of Local Government, Intergovernmental Revenue, Job Specialization, Capital Expenditure, Mandatory Disclosure Level of Government Financial Reports*

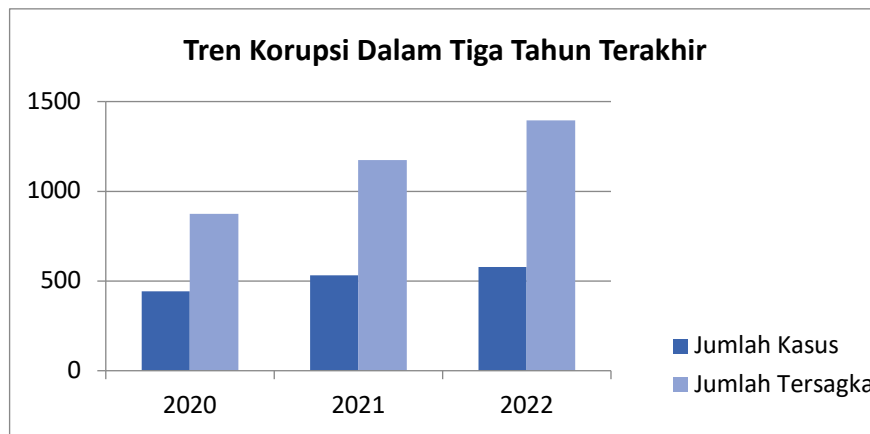
ABSTRAK

Penelitian ditujukan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, spesialisasi pekerjaan, dan belanja modal terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah. Pengungkapan berdasarkan Peraturan Pemerintah terkait Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Data sekunder berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Total sampelnya 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan pengamatan 51 LHP LKPD mulai dari tahun 2020-2022. Data dianalisis dengan teknik regresi linier berganda menggunakan Eviews 12. Penelitian menunjukkan hasil, yakni ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah signifikan dan berpengaruh positif; *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah signifikan dan berpengaruh negatif; sementara spesialisasi pekerjaan dan belanja modal terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah tidak berpengaruh signifikan; dan keempatnya dengan simultan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah berpengaruh signifikan.

Kata kunci: *Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Spesialisasi Pekerjaan, Belanja Modal, Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah*

PENDAHULUAN

Sejak UU Nomor 23 Tahun 2024 terkait Pemerintahan Daerah ditetapkan, Indonesia memulai era otonomi dan desentralisasi fiskal. Penyelenggaraan otonomi daerah menegaskan dasar demokrasi dimana masyarakat memegang otoritas. Masyarakat memilih pemerintah untuk mengelola segala urusan baik pemerintah daerah hingga pusat. Pemerintah tidak boleh semena-mena menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, mereka juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Namun, dalam beberapa keadaan pemerintah lebih mementingkan kepentingannya dan berakibat pada tindak kolusi, nepotisme, dan korupsi.



Gambar 1. Tren Korupsi di Indonesia Tahun 2020-2022

Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW)

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* terjadi peningkatan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pada Tahun 2022 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Pemerintah daerah berada pada peringkat ke tiga sektor yang paling banyak melakukan tindak korupsi. Pemetaan kasus korupsi berdasarkan jabatan yang dilansir dari ICW yaitu pegawai pemerintah daerah menjadi jumlah tersangka paling banyak melakukan tindak pidana korupsi dengan presentase 26,15%. Berdasarkan pemantauan wilayah yang dilakukan oleh ICW, pada Tahun 2022 Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat ke lima provinsi yang paling banyak melakukan tindak korupsi.

Pengelolaan dan penataan pemerintah yang baik adalah usaha pemerintah untuk memberantas praktik korupsi (Verawaty et al., 2019). Untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah hendaknya menyerahkan laporan keuangannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu kerangka konsep guna membuat laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan harus disertai pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengungkapan wajib adalah jumlah pengungkapan minimal yang ditentukan standar akuntansi pemerintahan yang diberlakukan, sementara pengungkapan sukarela ialah informasi yang tidak diamanatkan oleh aturan yang diuraikan dalam standar akuntansi atau organisasi

pengatur tetapi diungkapkan jika relevan dengan pengguna. Salah satu standar yang digunakan dalam mengevaluasi laporan oleh BPK adalah tingkat pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Tingkat pengungkapan yang disajikan baik tinggi atau rendah akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK (Priharjanto & Wardani, 2017).

Berdasarkan data IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) Semester I Tahun 2023, jumlah LKPD Tahun 2022 yang mendapatkan opini WTP mengalami penurunan dari Tahun 2021. Pada LKPD Tahun 2021, 500 dari 542 LKPD mendapatkan opini WTP sementara LKPD Tahun 2022 496 dari 542 LKPD mendapatkan opini WTP dimana Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kota Pagar Alam, dan Pemerintah Kota Palembang mengalami penurunan opini yang tadinya WTP menjadi WDP pada Tahun 2022. Dilansir dari sumsel.bpk.go.id, terdapat 5 wilayah yang mendapatkan opini WTP, 8 wilayah mendapatkan opini WTP tetapi dengan Penekanan Satu Hal dan 4 wilayah turun menjadi opini WDP dari 17 Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan pada Tahun 2022, dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan sejak 2021. Opini WTP masih belum menjamin bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyampaikan secara wajar laporan keuangannya serta melaksanakan pengungkapan selaras pada standar akuntansi apalagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan opini WTP.

Ukuran pemerintah daerah merupakan sebuah komponen dari struktur organisasi adalah faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan (Anggara & Cheisviyanny, 2020). Total keseluruhan aset menunjukkan ukuran sebuah daerah. Semakin banyak aset yang dimiliki maka akan semakin kompleks dalam pengelolaan informasinya untuk diungkapkan. *Intergovernmental revenue* adalah pendapatan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai hasil transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Astuti et al., 2022). Semakin besar *intergovernmental revenue* pada suatu daerah akan mendorong pengungkapan laporan keuangan semakin tinggi sebagai wujud tanggungjawab pengelolaan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Faktor lainnya yaitu spesialisasi pekerjaan adalah tingkat pendidikan formal anggota (Simbolon & Kurniawan, 2018). Saat menyajikan laporan keuangan, pemimpin daerah dengan pendidikan akuntansi atau ekonomi akan lebih mudah menerapkan standar akuntansi. Pada penelitian Praptiningsih & Jihan Khoirunnisa (2020) penggunaan dana oleh pemerintah daerah untuk memperluas atau menumbuhkan aset daerah yang akan menguntungkan lebih dari satu tahun anggaran dikenal sebagai belanja modal. Peningkatan belanja modal yang digunakan untuk memupuk pelayanan masyarakat akan memotivasi pemerintah daerah meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya.

Penelitian pengungkapan laporan keuangan yang diwajibkan kepada pemerintah daerah tidak seluas pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan membuat penelitian ini menarik dilakukan. Hal ini karena informasi pemerintah sulit diperoleh masyarakat umum yang biasanya lebih bersifat rahasia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan informasi dan

menyadari pentingnya akuntabilitas dan transparansi dengan menganalisis serta mengevaluasi pengungkapan yang diwajibkan oleh pemerintah daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Stewardship

Sudaryo dkk (2017) mengatakan “Teori *stewardship* ialah kondisi ketika manajer tidak mementingkan diri tetapi cenderung mementingkan kepentingan prinsipal”. Pemerintah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal*. Dalam hal menjalankan tugas dan kegiatannya, pemerintah daerah dipercaya untuk berperilaku demi kepentingan umum. Hal ini menciptakan akuntabilitas dan transparansi proses pengungkapan laporan keuangan dan pada akhirnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban kepada masyarakat diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pengelolaan keuangan, pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dalam rangka melaporkan kinerja selama jangka waktu yang telah ditentukan, pelaporan keuangan memberikan informasi terhadap pihak penting yang tidak terlibat dengan entitas pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah mengenai standaraakuntansi pemerintahan Nomora71 Tahun 2010 adalah standar utama dalam persyaratan pelaporan keuangan. SAP dijalankan di pemerintah daerah maupun pusat serta oleh divisi di dalamnya. SAP dinyatakan pada pernyataan SAP (PSAP). Komite SAP (KSAP) bertugas menyusun SAP.

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Pengungkapan bermakna laporan perlu mengandung informasi dan memberikan penjelasan tentang aktivitas dari suatu usaha. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan kompoinen penting laporan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menerangkan CaLK berisi pemaparan yang bersifat naratif atau informasi lebih lanjut tentang angka-angka yang dimuat pada laporan Perubahan Ekuitas, Arus Kas, Realisasi Anggaran, Operasional, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Neraca. CaLK meliputi kebijakan akuntansi diterapkan entitas pelaporan serta informasi lainnya diungkapkan sesuai SAP hingga laporan memberikan hasil yang wajar.

Ukuran Pemerintah Daerah

Penulis memakai variabel totalaset menjadi proksi dari variabel ukuran pemerintah daerah. Aset mengacu pada sumber daya keuangan dikumpulkan pemerintah sebagai hasil dari transaksi terdahulu dan keuntungan finansial yang diharapkan di masa depan (Simbolon & Kurniawan, 2018). Pemerintah daerah pemilik total aset besar mempunyai tekanan yang semakin kompleks pada

pengelolaan asetnya sehingga dalam proses pengungkapannya harus menaruh perhatian yang lebih ekstra untuk dapat menyesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue ialah pendapatan yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai hasil transfer kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat (Astuti et al., 2022). Dana perimbangan nama lain dari *intergovernmental revenue*. Dana perimbangan memuat tiga dana yaitu dana alokasi umum, alokasi khusus, dan bagiahasil. Dana ini merupakan dana dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai program-program daerah sebagai sarana pelayanan masyarakat. Sehingga membuat pemerintah daerah lebih terdorong meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana untuk mewujudkan kepercayaan pemerintah pusat dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.

Spesialisasi Pekerjaan

Spesialisasi pekerjaan adalah tingkatan pendidikan anggota secara formal (Simolon & Kurniawan, 2018). Latar belakang pendidikan kepala dan wakil kepala daerah berfungsi sebagai proksi dalam penelitian ini. Ketika membuat dan menampilkan laporan keuangan pemerintah, kepala daerah atau wakilnya yang berpendidikan di bidang akuntansi atau ekonomi dikatakan lebih memahami serta mengimplementasikan standar akuntansi.

Belanja Modal

Pada penelitian Praptiningsih & Jihan Khoirunnisa (2020) penggunaan dana oleh pemerintah daerah guna memperluas atau menumbuhkan aset daerah yang akan menguntungkan melebihi satu tahun anggaran dikenal sebagai belanja modal. Belanja modal berpotensi menciptakan aset berupa infrastruktur yang akan bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak, serta meningkatkan standar pelayanan publik. Pemerintah daerah cenderung terdorong mengungkapkan informasi yang lebih tinggi jika belanja modal tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Sampel diambil memakai teknik *nonprobability sampling*, yakni sampel jenuh. Sampelnya mencakup 17 Kota/kabupaten di Sumatera Selatan. Data sekunder berupa LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan periode 2020-2022 dengan total 51 pengamatan. Data diolah menggunakan Eviews 12.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Ukuran Pemerintah Daerah (X_1)	Ln (Total Aset)	Nominal
<i>Intergovernmental Revenue</i> (X_2)	$\frac{\text{DAU} + \text{DAK} + \text{DBH}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Spesialisasi Pekerjaan (X_3)	Variabel dummy; jika latar belakang Kepala Daerah atau Wakilnya adalah ekonomi, maka akan bernilai 1. Jika bukan maka bernilai 0.	Nominal
Belanja Modal (X_4)	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	$\frac{\text{Pengungkapan Dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan Dalam PSAP}} \times 100\%$	Rasio

Hipotesis:

- H₁: Ukuran Pemerintah Daerah signifikan dan berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah secara parsial.
- H₂: *Intergovernmental Revenue* signifikan dan berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah secara parsial.
- H₃: Spesialisasi Pekerjaan signifikan dan berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah secara parsial.
- H₄: Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah secara parsial.
- H₅: Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Spesialisasi Pekerjaan, dan Belanja Modal signifikan dan berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	28.97784	0.677843	0.196078	0.251765	0.506863
Maximum	30.55000	0.820000	1.000000	0.390000	0.630000
Minimum	28.41000	0.430000	0.000000	0.170000	0.440000
Std. Dev.	0.518769	0.069895	0.400979	0.059083	0.045276
Observations	51	51	51	51	51

Sumber: Data diolah, Output Eviews 12 (2024)

Pemilihan Model Data Panel

Tabel 3. Hasil Uji Model Data Panel

Uji Model Data Panel	Nilai Probabilitas >< Nilai Signifikansi	Hasil Uji Model
Uji Chow	0,0000 < 0,05	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	0,0004 < 0,05	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data diolah, Output Eviews 12 (2024)

Tabel 3 menunjukkan probabilitas uji chow sebesar $0,0000 < 0,05$, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Dilanjutkan uji hausman, probabilitas sebesar $0,0002 < 0,05$ model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. *Fixed Effect Model* terpilih dua kali yaitu pada uji chow dan uji hausman. Oleh karena itu, penggunaan model yang unggul yakni *Fixed Effect Model*. Hasil uji asumsi klasik penelitian ini data berdistribusi secara normal serta terbebas dari gejala multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.107158	2.308141	-2.212671	0.0347
X1	0.215994	0.082626	2.614113	0.0139
X2	-0.895982	0.221524	-4.044632	0.0003
X3	0.019975	0.034234	0.583490	0.5639
X4	-0.165193	0.152324	-1.084485	0.2868

Sumber: Data diolah, Output Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 4 persamaan regresi linier bergandanya, yaitu:

$$Y = - 5,107158 + 0,215994 X_1 - 0,895982 X_2 + 0,019975 X_3 - 0,165193 X_4 + e$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar -5,107158, variabel Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Spesialisasi Pekerjaan, dan Belanja Modal bernilai 0, Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah - 5,107158.
2. Nilai koefisien Ukuran Pemerintah Daerah (β_1) sebesar 0,215994 setiap kenaikan Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 1 satuan, meningkatkan Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah 0,215994.
3. Nilai koefisien *Intergovernmental Revenue* (β_2) -0,895982 setiap kenaikan *Intergovernmental Revenue* sebesar 1 satuan, menurunkan Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah sebesar 0,895982.
4. Nilai koefisien Spesialisasi Pekerjaan (β_3) sebesar 0,019975 setiap kenaikan Spesialisasi Pekerjaan sebesar 1 satuan, meningkatkan Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah 0,019975.

5. Nilai koefisien Belanja Modal (β_4) -0,165193, setiap kenaikan Belanja Modal sebesar 1 satuan, menurunkan Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah 0,165193.

Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.793271	Mean dependent var	0.506863
Adjusted R-squared	0.655451	S.D. dependent var	0.045276
S.E. of regression	0.026577	Akaike info criterion	-4.124675
Sum squared resid	0.021189	Schwarz criterion	-3.329218
Log likelihood	126.1792	Hannan-Quinn criter.	-3.820707
F-statistic	5.755861	Durbin-Watson stat	2.398108
Prob(F-statistic)	0.000010		

Sumber: Data diolah, Output Eviews 12 (2024)

Nilai *adjusted R square* 0,655451 atau 65,5%. Ini menunjukkan variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, Spesialisasi Pekerjaan, dan Belanja Modal dapat menyumbang 65,5% dari variabel tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah. Berbagai faktor lain yang tidak dimua pada penelitian berefek 34,5% dari sisanya.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 6. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.107158	2.308141	-2.212671	0.0347
X1	0.215994	0.082626	2.614113	0.0139
X2	-0.895982	0.221524	-4.044632	0.0003
X3	0.019975	0.034234	0.583490	0.5639
X4	-0.165193	0.152324	-1.084485	0.2868

Sumber: Data diolah, Output Eviews 12 (2024)

1. Berdasarkan hasil output tabel 8, nilai t hitung ukuran pemerintah daerah 2,614113 dan melampaui t tabel (2, 614113 > 2,01290), serta signifikansinya 0,0139, nilai ini menunjukkan (0,0139 < 0,05). Secara parsial, uji t menyatakan ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah pemerintah signifikan dan berpengaruh positif, maka H_1 diterima. Total aset mewakili variabel ukuran pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang punya total aset lebih akan bertanggungjawab lebih besar juga untuk mengungkapkan laporan keuangan mereka sesuai SAP. Hasil ini sejalan dengan kajian Simbolon & Kurniawan (2018).
2. Berdasarkan output tabel 8, t hitung variabel *intergovernmental revenue* sebesar -4,044632 dan melampaui t tabel (-4,044632 > 2,01290), serta memperoleh signifikansi 0,0003, yang menunjukkan (0,0003 < 0,05). Secara parsial, uji t menyatakan *intergovernmental revenue* terhadap tingkat

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah pemerintah signifikan dan berpengaruh negative, maka H_2 ditolak. Dengan ini ditunjukkan bertambah tinggi *intergovernmental revenue* tidak selaras pada peningkatan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah justru menurun. Dikarenakan dalam era desentralisasi ini, tidak terdapat pengawasan khusus oleh pemerintah pusat atas penggunaan dana *intergovernmental revenue* sehingga pemerintah daerah tidak memiliki dorongan ataupun tekanan meningkatkan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah mereka. Hal ini selaras dengan kajian Fuadi & Asmara (2020).

3. Sesuai output dari tabel 8, t hitung variabel spesialisasi pekerjaan 0,583490 dan lebih rendah dari t tabel ($0,583490 < 2,01290$) serta memperoleh signifikansi 0,5639, yang menunjukkan ($0,5639 > 0,05$). Secara parsial, uji t menyatakan spesialisasi pekerjaan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah pemerintah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah tidak berpengaruh signifikan, maka H_3 ditolak. Masih banyak kepala daerah atau wakil yang bukan dilatarbelakangi ekonomi terutama pada sampel dalam penelitian ini. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian kepala daerah atau wakil terhadap pengungkapan laporan keuangan atau penerapan SAP yang tidak tepat, yang mengakibatkan penyajian pengungkapan laporan yang kurang baik. Hal ini sejalan dengan kajian Simbolon & Kurniawan (2018).
4. Berdasarkan hasil ouput yang diperoleh dari tabel 8, t hitung belanja modal - 1,084485 dan melampaui t tabel ($1,084485 > 2,01290$), serta memperoleh signifikansi 0,2868, yang menunjukkan ($0,2868 > 0,05$). Dengan parsial, uji t menyatakan belanja modal terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah pemerintah tidak berpengaruh signifikan, maka H_4 ditolak. Belanja Modal yang besar seringkali menjadi kendala sebab tidak semua belanja modal yang digunakan tercatat baik. Pada beberapa kasus, belanja modal lebih rentan terhadap praktik yang tidak mematuhi regulasi karena pemerintah daerah lebih fokus pada pelaksanaan fisiknya. Hal ini dibuktikan dimana berdasarkan IHPS semester 1 tahun 2023 Belanja Modal adalah salah satu akun seringkali tidak dipaparkan sesuai SAP. Hal ini sejalan dengan kajian Andriani et al. (2019).

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 7. Hasil Uji F

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.793271	Mean dependent var	0.506863
Adjusted R-squared	0.655451	S.D. dependent var	0.045276
S.E. of regression	0.026577	Akaike info criterion	-4.124675
Sum squared resid	0.021189	Schwarz criterion	-3.329218
Log likelihood	126.1792	Hannan-Quinn criter.	-3.820707
F-statistic	5.755861	Durbin-Watson stat	2.398108
Prob(F-statistic)	0.000010		

Sumber: Data diolah, Output Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 7, variabel ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, spesialisasi pekerjaan, dan belanja modal bernilai F hitung 5,755861. Anagka ini lebih dari F tabel ($5,755861 > 2,57$) dan signifikansi $0,000010 < 0,05$. Uji F menampilkan secara simultan variabel ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, spesialisasi pekerjaan, dan belanja modal terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah berpengaruh signifikan, maka H_5 diterima.

KESIMPULAN

Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah secara parsial. Dana perimbangan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah secara parsial. Sementara spesialisasi pekerjaan dan belanja modal terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, spesialisasi pekerjaan, dan belanja modal terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah berpengaruh signifikan.

SARAN

Harapannya penelitian selanjutnya tidak sekedar mengkajii pengungkapan wajib namun dibubuhi pula dengan kajian pengungkapan sukarela. Memakai sampel yang bertambah luas dan memperpanjang periode penelitian sehingga mampu menggambarkan situasi kondisi yang sebenarnya dan memakai variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*.
- _____. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*.
- _____. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*.
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.30630/jam.v14i1.81>
- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162–2184. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.205>
- Astuti, W., . W., & Wahyuningsih, P. (2022). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan

- Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 49–57. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.445>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*.
- Fuadi, M. Z., & Asmara, J. A. (2020). Penerimaan Dari Pemerintah Pusat, Ukuran Legislatif, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 96–106. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15471>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022*. Indonesia Corruption Watch. *Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022*.
- Praptiningsih, & Jihan Khoirunnisa. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Jumlah SKPD dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara. *Corresponding Email: Praptiningsih@upnvj.Ac.Id Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 277–285.
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Info Artha*, 1, 97–110. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.72>
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia. *Modus*, 30(1), 54–70.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N.A., & Christian, P. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Sumsel BPK. (2023, Agustus 1). Cuma 6 Pemda di Sumatera Selatan Raih WTP, 4 Turun Jadi WDP, Apa Penyebabnya? BPK Sumsel. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024, dari <https://sumsel.bpk.go.id/2023/08/01/cuma-6-pemda-di-sumatera-selatan-raih-wtp-4-turun-jadi-wdp-apa-penyebabnya/>
- Verawaty, Jaya, A. K., & Alsri, A. P. (2019). Kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD Provinsi di Indonesia. *Seminar Hasil Penelitian Vokasi (SEMHAVOK)*, 17, 46–53.
<http://conference.binadarma.ac.id/index.php/semhavok/article/view/973/446>